

ABSTRACT

This paper aimed to describe the roles of civil society organizations in managing diversity at schools. Civil society organization is an important element in a democracy. Their role in many aspects of life in Indonesia has been widely revealed, including in the education sector. Education in Indonesia reflects the character of Indonesian society in general, which is rich in diversity. Therefore, managing diversity in schools becomes a paramount issue. This is to anticipate the emergence of conflicts stemming from intolerance and inability to accept differences. This paper was written through library research. Data were collected from various sources: books, journals, reports, and websites containing information about civil society organizations and their work in managing diversity in education. Research findings revealed that a number of civil society organizations had played a role in managing diversity in education units through various activities such as trainings, seminars, and discussions. These various activities target almost every element in the school; namely students, teachers, and principals.

Key words: *civil society organization, diversity management, tolerance in schools, diversity education, peace in schools*

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan peran-peran organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan keragaman di sekolah. Organisasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam suatu negara demokrasi. Peran mereka dalam banyak segi kehidupan di Indonesia telah banyak terungkap, termasuk dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia mencerminkan karakter masyarakat Indonesia secara umum, yaitu adanya keragaman. Dengan adanya fakta keragaman itu, pengelolaan keragaman di sekolah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Hal tersebut untuk mengantisipasi potensi munculnya konflik yang bersumber dari sikap yang tidak menerima perbedaan atau sikap intoleran. Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, laporan, serta situs jejaring yang berisi informasi mengenai organisasi masyarakat sipil dan kiprahnya dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam pengelolaan keragaman di satuan pendidikan melalui beragam kegiatan, seperti pelatihan, seminar, dan diskusi. Berbagai kegiatan tersebut menasar hampir setiap elemen di sekolah, yaitu peserta didik, guru, dan kepala sekolah.

Kata kunci: organisasi masyarakat sipil, pengelolaan keragaman, toleransi di sekolah, pendidikan kebinekaan, sekolah damai

PENDAHULUAN

Banyaknya suku bangsa, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkontribusi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut tidak hanya hadir dalam kehidupan masyarakat secara umum, tetapi juga menjadi fakta dalam dunia pendidikan. Para peserta didik, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang heterogen, harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dari mereka; terutama dalam hal agama—termasuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—dan suku bangsa.

Sebagai sebuah fakta, keragaman di dunia pendidikan telah menjadi isu penting dalam kebijakan pendidikan. Ketika membicarakan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemajemukan bangsa merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan; sehingga tercapai penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Akomodasi isu keragaman dalam kebijakan pendidikan sangat dapat dipahami. Selain bahwa keragaman memang suatu fakta, keragaman di dunia pendidikan juga mengandung potensi ganda. Di satu sisi, keragaman dapat menjadi sumber konflik di satuan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan menjadi pintu masuk yang efektif bagi penyebaran nilai-nilai yang menghormati keragaman (Hendrik dkk., 2020). Konflik yang berkaitan dengan keragaman biasanya bersumber pada sikap intoleran, yang secara garis besar dapat dikatakan sebagai sikap tidak menenggang pendirian yang berbeda. Sejumlah kasus intoleransi di dunia pendidikan telah tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai contoh, pada tahun 2014, terjadi kasus pelarangan penggunaan hijab atau jilbab—penutup kepala wanita beragama Islam—di SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar, Bali. Pada tahun 2017, di SMAN 1 Maumere terjadi pelarangan jilbab. Pada tahun 2018, kepala SMAN 8 Yogyakarta mewajibkan siswanya, termasuk yang beragama Kristen dan Katolik,

untuk mengikuti kegiatan kemah di Hari Paskah. Pada tahun 2019, ada surat edaran di SDN 3 Karang Tengah, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang isinya mewajibkan semua siswa di sekolah tersebut untuk mengenakan seragam ala pakaian muslim. Pada tahun 2019 di SD Inpres 22 Wosi Manokwari terjadi pelarangan jilbab. Pada tahun 2020, di SMAN 1 Gemolong, Sragen, terjadi kasus perundungan oleh seorang siswa aktivis Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah tersebut terhadap siswi lainnya karena tidak berhijab (Kompas.com, 2021).

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan perlunya pengelolaan keragaman yang baik dalam dunia pendidikan. Pengelolaan keragaman di sekolah merupakan usaha-usaha dalam rangka pengakuan serta penyediaan ruang berekspresi untuk semua unsur dalam sekolah; sehingga setiap warga sekolah dapat mengusung jati diri masing-masing dan saling berinteraksi tanpa adanya upaya-upaya peminggiran (Suhadi, 2016).

Menyadari pentingnya pengelolaan keragaman di satuan pendidikan, sejumlah pihak telah berupaya untuk menghadirkannya. Penelitian oleh Hendrik dkk. (2020) menemukan bahwa kelahiran praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah melibatkan peran beberapa pihak, yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, yayasan pendidikan, tokoh agama, dan guru pendidikan agama. Di antara pihak-pihak tersebut, tampak ada organisasi nonpemerintah, yang dalam konteks ini dapat disebut juga sebagai organisasi masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Kontribusinya dinilai berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mereka merupakan mitra pemerintah dalam implementasi program-program pembangunan; di samping fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat serta penyeimbang relasi antara rakyat dan negara (Herdiansyah & Randi, 2016).

Contoh konkret mengenai peran organisasi masyarakat sipil telah banyak dipublikasikan. Suharko dan Kusumadewi (2019) mengemukakan temuan penelitiannya tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam bidang pelestarian lingkungan. Diungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil bernama Gerakan Memungut

Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS-SKM) telah berperan dalam mengedukasi warga sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda, mengenai pentingnya menjaga kelestarian sungai (Suharko & Kusumadewi, 2019). Ada pula Kamim (2019) yang mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil berperan dalam proses perintisan sistem informasi desa. Dalam tulisannya, penulis tersebut menceritakan bagaimana organisasi masyarakat sipil bernama Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) berperan penting sebagai mitra pembangunan desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; dengan diimbangi oleh peran mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (Kamim, 2019).

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam dunia pendidikan telah menjadi topik yang diteliti, dan sejumlah literatur yang mengungkapkan peran organisasi masyarakat sipil dalam dunia pendidikan telah tersedia. Hasibuan dan Yeltriana (2021) mengemukakan bahwa dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak-anak dalam sektor pendidikan, organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga lain yang bervisi sama (Hasibuan & Yeltriana, 2021). Dalam mengimplementasikan perlindungan hak-hak anak, organisasi masyarakat sipil harus menempatkan anak-anak sebagai subjek serta mendorong partisipasi mereka. Januarti (2013) mengemukakan temuannya bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam membuka ruang interaksi antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dalam studinya, dikemukakan bahwa perhimpunan orang tua murid, karang taruna, dan sanggar seni di suatu daerah di Yogyakarta mendorong sekolah berfungsi sebagai ruang partisipasi dan pemberdayaan serta transformasi budaya (Januarti, 2013). Latief (2013) mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya yaitu melalui mekanisme wakaf dan sedekah. Ditambahkan bahwa peran tersebut kebanyakan berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, sehingga perlu merambah dunia pendidikan tinggi dengan mendorong hadirnya riset-riset lain (Latief, 2013).

Lebih jauh lagi, pengelolaan keragaman juga telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti,

sehingga literatur-literatur tentang hal tersebut telah beredar. Khairiah dan Walid (2020) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural berperan dalam pengelolaan keragaman, sehingga diharapkan terwujud masyarakat yang lebih toleran, demokratis, serta memahami dan menghargai perbedaan. Sementara itu, Sefriyono (2014) mengemukakan bahwa—dalam kasus di Padang Selatan—pengakuan keragaman agama, representasi keagamaan di ruang publik, redistribusi sumber daya, amalgamasi, dan relasi ketokohan berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman agama. Adapula Rumahuru (2018) yang mengemukakan bahwa pendidikan agama yang inklusif dapat menjadi solusi bagi masalah pengelolaan keragaman. Pendidikan agama yang inklusif yang dimaksud yaitu pendidikan agama yang menekankan pada upaya pembangunan kesadaran mengenai perbedaan serta penerimaan terhadap kelompok lain di luar kelompok sendiri.

Uraian-uraian di atas mengemukakan bahwa organisasi masyarakat sipil telah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Lebih spesifik lagi, dikemukakan pula bahwa organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam dunia pendidikan. Namun, literatur-literatur dimaksud belum menyentuh isu peran organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Terakhir, literatur-literatur mengenai pengelolaan keragaman juga telah dihadirkan, tetapi di antaranya belum ada yang memaparkan tentang peran organisasi masyarakat sipil di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini bermaksud memaparkan peran organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan keragaman di sekolah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen sumber—berupa buku, laporan, jurnal ilmiah, serta situs jejaring—yang berisi data mengenai organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan. Teknik pemilihan dokumen yaitu dengan teknik *snow ball*, di mana keberadaan suatu dokumen

ditelusuri dari keberadaan dokumen-dokumen lainnya. Data yang dikumpulkan—yaitu berupa deskripsi organisasi masyarakat sipil serta peran mereka dalam pengelolaan keragaman di dunia pendidikan—kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membuat kategori-kategori tertentu yang muncul berdasarkan temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini akan membahas tiga (3) organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pengelolaan keragaman di sekolah, yaitu Wahid Foundation, Yayasan Cahaya Guru, dan Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei). Jejak kiprah ketiga organisasi masyarakat sipil tersebut dapat dijumpai dalam Hendrik dkk. (2020). Buku tersebut membahas peran Wahid Foundation dalam pengelolaan keragaman di satuan pendidikan melalui program Sekolah Damai. Dibahas pula tentang Yayasan Cahaya Guru yang menerbitkan buku berisi deskripsi sekolah-sekolah yang memiliki praktik pengelolaan keragaman yang baik. Terakhir, dikemukakan pula tentang Interfidei yang berperan dalam pemberian pelatihan dan pembimbingan kepada sejumlah guru agama mengenai pentingnya penerimaan dan penghormatan terhadap keragaman.

Gambaran umum serta kiprah masing-masing organisasi masyarakat sipil tersebut diuraikan pada bagian-bagian berikut.

Wahid Foundation

Wahid Foundation merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk mewujudkan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid—presiden Republik Indonesia keempat—yaitu membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia yang diinspirasi nilai-nilai Islam. Organisasi ini diluncurkan di Jakarta pada 7 September 2004. Konteks pendirian Wahid Foundation yaitu pada saat dunia masih dikejutkan oleh tragedi 2001/11/09—yaitu kasus terorisme di New York; dan terjadinya sejumlah kasus kekerasan komunal yang dipicu oleh isu agama atau

identitas etnik di Indonesia beberapa tahun sebelumnya (Wahid Foundation, 2020).

Pendiri Wahid Foundation terdiri dari Abdurrahman Wahid, Greg Barton, Yenny Wahid, dan Ahmad Suaedy. Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)—salah satu organisasi massa Islam di Indonesia—dari tahun 1983 sampai dengan 1998. Selain dikenal karena jabatannya, Abdurrahman Wahid dianggap sebagai salah seorang intelektual Islam progresif, yang pemikiran dan perjuangannya berupaya untuk mewujudkan perdamaian dan toleransi. Greg Barton adalah Profesor Politik Global Islam di Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization Deakin University, Melbourne, Australia. Ia merupakan peneliti topik kontribusi liberalisme Islam di Indonesia terhadap perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi. Salah satu tokoh utama dalam penelitian yang dilakukan oleh Barton adalah Abdurrahman Wahid, sehingga mereka memiliki hubungan yang dekat. Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenni Wahid merupakan putri Abdurrahman Wahid. Ia adalah seorang mantan wartawan surat kabar Australia. Di samping berbagai jabatan yang diembannya, Yenni Wahid dikenal sebagai pewaris pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid. Adapun Ahmad Suaedy merupakan sosok yang dikenal sebagai aktivis Islam progresif, yang bergerak di antara isu demokratisasi dan advokasi minoritas agama dan tradisi di Indonesia. Ia juga meneliti tentang minoritas muslim di Asia Tenggara (Wahid Foundation, 2020).

Selaras dengan latar belakang pendirian serta profil para pendirinya, Wahid Foundation banyak berkiprah dalam isu yang berkaitan dengan keragaman dan perdamaian. Jejak langkah organisasi tersebut juga banyak direkam oleh media massa. Sebagai contoh, Media Indonesia (2022) memberitakan bagaimana Wahid Foundation berusaha untuk menggaungkan narasi toleransi dengan memberi fasilitas kepada kreator konten Islam moderat. Contoh lainnya, yaitu berita penerbitan Modul Panduan Kontra Narasi dan Narasi Alternatif Toleransi dan Perdamaian oleh Wahid Foundation (Sindonews, 2021).

Ragam kegiatan Wahid Foundation mencakup empat pilar, yaitu: riset advokasi dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, Sekolah Perdamaian Gus Dur, dan Gus Dur untuk kemanusiaan. Pilar riset advokasi dan kebijakan berisi kegiatan-kegiatan riset seputar isu Islam damai, toleransi, kemerdekaan beragama, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Hasil-hasil riset tersebut dijadikan dasar advokasi dan rekomendasi kebijakan serta pemberdayaan masyarakat. Pilar pemberdayaan masyarakat berisi beragam kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bingkai kolaborasi dan inovasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Di dalam pilar ini, ada program Desa Damai, program Sekolah Damai, dan Koperasi Cinta Damai. Pilar Sekolah Perdamaian Gus Dur merupakan program dan gerakan kaderisasi untuk menghasilkan aktor-aktor penerus perdamaian yang berlandaskan pada nilai dan gerakan yang diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid. Pilar Gus Dur untuk kemanusiaan berupaya untuk mewujudkan misi kemanusiaan Abdurrahman Wahid dengan mendorong kegiatan filantropi dan tanggap bencana di seluruh Indonesia (Wahid Foundation, 2020).

Wahid Foundation juga menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan formal. Sejak tahun 2017, Wahid Foundation telah menginisiasi program Sekolah Damai. Program tersebut didesain sebagai upaya penanggulangan potensi sikap dan perilaku intoleran serta radikalisme di satuan pendidikan formal (Wahid Foundation, 2021). Tujuan program Sekolah Damai adalah membangun budaya sekolah yang damai dan toleran. Adapun sasarannya mencakup siswa, guru, dan kepala sekolah (Wahid Foundation, 2019).

Ada tiga pilar program yang menjadi fokus Sekolah Damai, yaitu: (1) pilar kebijakan sekolah, (2) pilar praktik toleransi dan perdamaian, dan (3) pilar pengelolaan organisasi kesiswaan. Adapun prinsip yang dijalankan program Sekolah Damai adalah partisipatif, kolaboratif, dan kreatif. Ketiga prinsip ini yang menjadi dasar utama dalam pelibatan siswa, guru, dan kolaborasi dengan pihak eksternal (Wahid Foundation, 2019).

Pilar kebijakan sekolah mengharapkan adanya keluaran berupa kebijakan tertulis kepala sekolah yang mendukung dan mempromosikan budaya damai dan toleran di sekolah. Dalam pilar ini, kepala sekolah diharapkan untuk menerbitkan: (1) surat keputusan tentang tim kerja Sekolah Damai; (2) surat keputusan tentang integrasi Sekolah Damai; (3) surat keputusan tentang pengembangan lingkungan Sekolah Damai; (4) surat keputusan tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran kelas; dan (5) sistem deteksi dini pencegahan intoleransi dan radikalisme (Wahid Foundation, 2019).

Pilar praktik toleransi dan perdamaian mengharapkan adanya keluaran berupa praktik toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah dan ruang kelas. Di dalamnya, contoh kegiatan yang diharapkan yaitu menjenguk warga sekolah yang sakit tanpa memandang perbedaan; kunjungan ke rumah ibadah berbagai agama; tidak menggunakan sebutan kafir untuk orang yang berbeda agama; mendesain taman Sekolah Damai atau ruang bersama lainnya; publikasi dan promosi narasi dan informasi yang berbau perdamaian dan toleransi di ruang-ruang dan acara-acara strategis sekolah; menyusun dan mempraktikkan aturan di kelas yang mencerminkan prinsip nondiskriminatif; serta menyusun desain pembelajaran yang kolaboratif serta mengangkat tema toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan (Wahid Foundation, 2019).

Pilar pengelolaan organisasi kesiswaan mengharapkan adanya keluaran berupa peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus dan anggota organisasi siswa dalam mempromosikan dan mempraktikkan perdamaian dan toleransi. Di dalamnya diharapkan ada kegiatan-kegiatan seperti penyusunan standar operasional dan prosedur pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS yang demokratis dan nondiskriminatif di lingkungan sekolah; pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus OSIS; serta pelatihan kepemimpinan bagi organisasi siswa (Wahid Foundation, 2019).

Yayasan Cahaya Guru

Yayasan Cahaya Guru merupakan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian

pada isu keragaman dan kebangsaan. Saat ini Yayasan Cahaya Guru dipimpin oleh Henny Supolo, seorang tokoh yang dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai orang yang peduli isu kebinekaan. Salah satu latar belakang pendirian Yayasan Cahaya Guru yaitu ditemukannya fakta bahwa wawasan mengenai keragaman semakin berkurang di antara warga sekolah negeri (Yayasan Cahaya Guru, 2018).

Rekam jejak organisasi ini dalam isu-isu yang berkaitan dengan keragaman telah banyak dimuat oleh media massa. Sebagai contoh, Yayasan Cahaya Guru menyoroti adanya kasus-kasus penyeragaman pakaian sekolah siswa dan guru ala agama tertentu di sejumlah satuan pendidikan. Hal ini dinilai tidak tepat karena sekolah seharusnya merupakan wahana penyemaian keragaman (Tempo.co, 2014). Contoh lainnya, Yayasan Cahaya Guru menyoroti adanya kecenderungan penguatan identitas keagamaan dan sikap intoleran yang berimbas pada pengutamaan-pengutamaan di satuan pendidikan; yang harus disikapi dengan mengadakan forum pertemuan antara pihak-pihak yang berbeda-bedaini (Tirto.id, 2017).

Organisasi ini memiliki visi terwujudnya masyarakat guru yang menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Adapun misinya, yaitu: (1) mengembangkan kajian keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan; (2) meningkatkan kapasitas guru dalam isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan; (3) melakukan advokasi kebijakan pendidikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan; dan (4) melakukan promosi keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan (Yayasan Cahaya Guru, 2018).

Sebagaimana tercermin dari namanya, Yayasan Cahaya Guru memang berfokus pada peran guru dalam pendidikan. Bentuk-bentuk kegiatan Yayasan Cahaya Guru berupa pelatihan, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan berbagai kegiatan lain. Semua kegiatan itu diisi dengan muatan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ragam program yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Guru yaitu Sekolah Guru Kebinekaan, Pelatihan Pengelola Kebinekaan, Pelatihan Guru Kebinekaan, Ngobrol Pendidikan (NGOPI), Cerita Kami, Apresiasi Seni Pertunjukan,

serta Advokasi Kebijakan dan Survei (Yayasan Cahaya Guru, 2018).

Salah satu program Yayasan Cahaya Guru yang gaungnya banyak didengar yaitu Sekolah Guru Kebinekaan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Yayasan Cahaya Guru sendiri telah menjalankan banyak program yang berfokus pada pendidikan berbasis kearifan lokal sejak tahun 2007 sampai 2010, dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal untuk pembelajaran, sehingga sekolah tidak mengalami hambatan kekurangan infrastruktur dan bahan belajar. Sejak tahun 2010, Yayasan Cahaya guru berfokus pada kebinekaan, karena menemukan permasalahan dalam hal pengelolaan keragaman (Mukhlisin, 2020).

Pada intinya, kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan menekankan upaya forum pertemuan para guru atau para pendidik. Semangat dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi para guru untuk berjumpa dengan kelompok lain yang berbeda, salah satunya melalui pertemuan dengan guru-guru yang memiliki identitas berbeda, termasuk berbeda agama. Tujuan Sekolah Guru Kebinekaan adalah menguatkan filosofi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan guru-guru dalam mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Mukhlisin, 2020).

Aspek-aspek yang ingin dibangun dalam kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan yakni: (1) aspek kesadaran; (2) aspek pengetahuan; dan (3) aspek keterampilan. Aspek kesadaran dibangun dengan menggali alasan-alasan mengapa seseorang menjadi guru. Aspek pengetahuan dibangun misalnya dengan memberikan materi tentang sejarah kebangsaan dan peran para pejuang, termasuk pejuang dari kalangan guru. Sedangkan dalam aspek keterampilan, para guru diharapkan untuk berbagi metode yang sudah dilakukan selama ini terkait pengelolaan keberagaman di kelas (Mukhlisin, 2020).

Kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan (SGK) terdiri dari 10 pertemuan dan terus dievaluasi. Awalnya SGK terdiri dari 15 pertemuan dengan waktu yang cukup panjang. Berdasarkan masukan guru-guru yang menjadi peserta, durasi tersebut dianggap terlalu lama dan melelahkan, sehingga terus dievaluasi supaya lebih efektif. Kegiatan

dilakukan dua minggu sekali dan memakan waktu kurang lebih lima sampai enam bulan (Mukhlisin, 2020).

Ada tiga tingkatan berdasarkan materi dan sasaran yang ingin dicapai, yakni tingkat dasar, lanjutan, dan rujukan. Tingkat dasar adalah tahap pengenalan tentang apa itu keragaman, apa saja bentuk keragaman di sekitar kita, dan bagaimana guru bisa menghadapi kondisi tersebut. Target dalam tahapan dasar ini tidak muluk-muluk, sebatas mengenali keragaman apa saja yang ada pada peserta didik dan di lingkungan sekolah. Pada tingkat lanjutan, tingkat kesulitannya lebih tinggi, guru-guru diminta untuk memahami keberagaman di lingkungan internal; berbagi pengalaman dan nilai-nilai kebinekaan pada lingkungan sekitar; mulai ada inisiatif perjumpaan komunitas lintas agama misalnya ke rumah-rumah ibadah agama-agama tertentu; bertemu langsung dengan tokoh agama; serta bertemu langsung dengan komunitas yang mengalami diskriminasi. Mereka juga berbagi dengan guru-guru lain dan dengan siswa. Pada tingkat lanjutan, para guru diminta melakukan pemetaan pemangku kepentingan di sekolah; untuk mencoba memengaruhi kebijakan, misalnya memetakan serta kemudian mendekati aktor-aktor tertentu untuk pengembangan wawasan keberagaman di sekolah. Para peserta Sekolah Guru Kebinekaan tingkat lanjutan juga harus mampu menggunakan keragaman yang ada di sekolah untuk proses-proses pembelajaran serta memprogramkan nilai-nilai kebinekaan dalam sekolah (Mukhlisin, 2020).

Setelah para guru melewati dua tingkat Sekolah Guru Kebinekaan di awal, yaitu dasar dan lanjutan, mereka dapat meningkat ke level rujukan. Pada tingkat rujukan, guru-guru diharapkan sudah mampu berperan dalam memengaruhi kebijakan. Guru-guru ini diharapkan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu keragaman dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk memengaruhi kebijakan sekolah agar lebih ramah terhadap keragaman. Melakukan advokasi kebijakan di sekolah adalah pekerjaan berat, tetapi beberapa guru berhasil melakukannya sehingga sekolah lebih menghargai keragaman (Mukhlisin, 2020).

Dalam proses menjalani Sekolah Guru

Kebinekaan, guru-guru diminta untuk melakukan dokumentasi sehingga bisa menjadi inspirasi metode bagi pihak lain. Para guru juga diharap memiliki dokumen-dokumen refleksi, membuka ruang perjumpaan, dan membagi pengalaman advokasi kebijakan (Mukhlisin, 2020).

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia, disingkat Interfidei, merupakan sebuah organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan keragaman, terutama dalam hal dialog antarumat beragama. Organisasi yang berbasis di Yogyakarta ini dikenal juga dengan nama Institut DIAN, singkatan dari Dialog Antar Iman (Interfidei, n.d.).

Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 dan kemudian diresmikan pada tahun 1992 oleh para tokoh yang peduli dengan kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia. Para tokoh tersebut yaitu Th. Sumartana, Eka Darma Putra, Djohan Effendi, Daniel Dakhidae, dan Zulkifly Lubis; di samping sejumlah tokoh lain yang juga berkontribusi terhadap kelahiran Interfidei (Interfidei, n.d.).

Th. Sumartana merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dalam dialog atau hubungan antarumat beragama, khususnya hubungan Kristen-Islam. Sebagai seorang teolog Protestan, ia mengajar di Program Pascasarjana Studi Agama dan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah (Suprobo, 2019). Eka Darma Putra merupakan seorang pendeta Kristen yang dikenal dengan gagasan oikumenis antara Kristen dan Katolik, serta dialog antara Kristen dan agama-agama lainnya. Selain melayani masyarakat sebagai pendeta, ia juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi serta menjadi anggota partai politik (Merdeka.com, n.d.). Djohan Effendi adalah seorang tokoh pluralisme yang sangat peduli dengan isu-isu kelompok minoritas, terutama Ahmadiyah. Ia merupakan mantan aktivis yang kemudian mengabdikan untuk negara sebagai pegawai negeri di Departemen Agama. Puncak kariernya yaitu Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2000 sampai 2021 (Ali-Fauzi, n.d.). Daniel Dakhidae merupakan seorang intelektual yang identik dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Ia sempat menjabat wakil direktur lembaga

tersebut dari 1982 hingga 1984. Sebagai seorang intelektual dalam bidang politik, ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap rezim Orde Baru (Setiawan, 2021). Sementara itu, Zulkifly Lubis adalah seorang wartawan senior yang jabatan terakhirnya yaitu Komisaris PT Tempo. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang aktif menyuarkan diskusi lintas agama dan hak asasi manusia. Sebagai wartawan, ia pernah merasakan represifnya rezim Orde Baru ketika Tempo dibredel pada tahun 1994 (Tempo.co, 2011).

Latar belakang pendirian Interfidei yaitu adanya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan hukum, konflik sosial-politik, kesadaran tentang urgensi perdamaian, serta potensi kooptasi dan politisasi agama oleh negara. Tujuan organisasi tersebut yaitu mempromosikan pentingnya merawat dan menghidupkan keragaman serta kerja sama dalam mencari solusi untuk berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia (Interfidei, n.d.).

Visi Interfidei adalah terciptanya masyarakat sipil yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Adapun misinya yaitu: (1) mendorong dan mengembangkan pemikiran keagamaan yang pluralistik melalui dialog; (2) menstimulasi sebuah jaringan yang dinamis bagi dialog dan kerja sama antaragama; dan (3) mendorong transformasi agama sebagai solusi bagi persoalan sosial-kemanusiaan yang dihadapi masyarakat (Interfidei, n.d.).

Rekam jejak Interfidei dalam menyuarkan serta memperjuangkan keragaman dan perdamaian banyak termuat dalam media massa. Contohnya, pemberitaan terkait kerja sama Interfidei dengan organisasi masyarakat sipil lainnya melatih orang-orang untuk menjadi fasilitator perdamaian (Tribun Makassar, 2018). Contoh lainnya, yaitu pemberitaan terkait inisiasi penyelenggaraan forum-forum yang menyuarkan pentingnya toleransi, semisal forum bertajuk “Dialog dan Kerja Sama Lintas Iman untuk Indonesia yang Lebih Baik, Damai, dan Toleran secara Kritis-Konstruktif” yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2019 (Sucahyo, 2019).

Pada awalnya, Interfidei merupakan sebuah forum yang menjadi wadah bagi diseminasi dan diskusi seputar isu keagamaan dan keragaman. Dalam perkembangannya, Interfidei

bertransformasi menjadi promotor urgensi merawat dan menghidupkan keberagaman serta dialog antariman. Dalam rangka mencapai hal-hal tersebut, Interfidei di antaranya menjadi penyelenggara dan fasilitator bagi berbagai program pendidikan—seperti lokakarya dan pelatihan—tentang pengelolaan keragaman dan kerja sama di antara komunitas agama-agama serta di dalam masyarakat secara umum. Target dari kegiatan Interfidei terdiri atas tiga kelompok; yaitu pemimpin agama berbasis komunitas, guru-guru agama-agama dan guru-guru pendidikan kewarganegaraan, dan kaum muda—aktivis lembaga swadaya masyarakat, ormas kepemudaaan, dan mahasiswa (Interfidei, n.d.).

Kegiatan-kegiatan Interfidei dapat dibagi menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu insidental dan rutin. Kegiatan-kegiatan insidental dan rutin itu kemudian mewujud dalam ragam bentuk (Widiarti dkk., 2016). Program-program yang digulirkan Interfidei mencakup penelitian, penerbitan, dan pendidikan—berupa kursus singkat atau pelatihan—dengan perhatian utama pada isu agama dan masyarakat (Wahyuni, 2019). Dalam program penelitian dan penerbitan, Interfidei telah menerbitkan banyak buku. Contoh dari terbitan Interfidei yaitu buku *Anotasi 200 Buku Islam Karya Muslim Indonesia*, yang merupakan terbitan di masa-masa awal perkembangan organisasi tersebut (Wildan, 2010).

Dalam program pendidikan, dilaksanakan lokakarya atau pelatihan seperti resolusi konflik, transformasi sosial, *peace buliding*, mengelola dinamika pluralisme, serta pendidikan agama berbasis keragaman. Contoh program Interfidei lainnya yaitu diskusi terbatas, seminar nasional, dan konferensi internasional (Wahyuni, 2019).

Sehubungan dengan program dan kegiatan dalam bidang pendidikan, Interfidei banyak melaksanakan seminar, lokakarya, pelatihan, dan semacamnya yang isinya bermaksud menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati keragaman dan perdamaian. Contoh program yang telah dilakukan, yaitu “Semiloka Pluralisme dan Multikulturalisme” (Farikhatin, 2019) dan “Kemah Pemuda Antar-Iman” (Warsito, 2019). Program-program itu ada yang menyasar guru sebagai peserta, ada juga yang menyasar siswa.

Bentuk konkret dari kegiatan Interfidei dalam dunia pendidikan misalnya kunjungan ke sekolah-sekolah tertentu. Kunjungan itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan. Contohnya, lokakarya yang dikonsepsi sebagai kegiatan belajar bersama yang menyoal para siswa—seperti yang terjadi di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta (SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, 2022)—atau dialog dengan para guru—seperti yang terjadi di SMA PIRI 1 Yogyakarta (Farikhatin, 2016). Di dalam setiap kegiatan tersebut, selalu tersampaikan muatan-muatan tentang keragaman dan perdamaian.

Selain bergerak di ranah pendidikan dasar dan menengah, Interfidei juga bergerak di level pendidikan tinggi. Salah satu program Interfidei untuk perguruan tinggi yaitu Sekolah Lintas Iman. Contoh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Interfidei dalam penyelenggaraan program Sekolah Lintas Iman yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), dan Universitas Sanata Dharma. Ketiga perguruan tinggi tersebut telah melaksanakan Sekolah Lintas Iman bersama Interfidei sejak tahun 2019 (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Dalam Sekolah Lintas Iman digunakan pendekatan andragogis—pembelajaran orang dewasa yang menekankan partisipasi aktif mahasiswa. Di dalamnya, fasilitator hanya berfungsi sebagai pendamping. Metode yang digunakan yaitu diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, pemaparan referensi, kunjungan lapangan, perjumpaan dan dialog, serta *live in*. Ada pula pemberian tugas berupa refleksi tentang apa yang sudah didapat pada setiap hari pertemuan; yang kemudian dipaparkan pada pekan berikutnya dalam bentuk yang beragam—misalnya narasi tertulis, lagu, puisi, dan karya seni rupa. Proses pembelajaran dilakukan secara berpindah-pindah di tempat-tempat seperti rumah ibadah, institusi sosial, organisasi masyarakat sipil, kampus, dan kantor pemerintah daerah (Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, 2022).

Dalam rangka menyebar jala lebih luas lagi di tingkat pendidikan tinggi, Interfidei juga menjadi tempat Kuliah Kerja Nyata-Integrasi Kompetensi (KKN-IK), seperti dilakukan oleh para mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Institut

Agama Islam Negeri Kudus (Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus, 2019).

Di luar dunia pendidikan, Interfidei juga menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Contohnya, kerja sama dengan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel dan OASE Intim dalam penyelenggaraan pelatihan bagi 15 orang pemuda lintas iman untuk menjadi calon fasilitator perdamaian (Tribun Makassar, 2018).

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Keragaman di Sekolah

Deskripsi ketiga organisasi masyarakat sipil di atas telah mengungkapkan sejumlah hal. *Pertama*, para pendiri organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pengelolaan keragaman merupakan tokoh-tokoh pengusung gagasan tentang keragaman dan perdamaian. *Kedua*, visi dan misi organisasi masyarakat sipil tersebut mencerminkan pemikiran para tokoh pendirinya, yaitu mengenai keragaman dan perdamaian. *Ketiga*, kiprah organisasi masyarakat sipil tersebut dalam mempromosikan keragaman dan perdamaian telah terekam dalam pemberitaan sejumlah media massa. *Keempat*, pada dasarnya tidak semua organisasi masyarakat sipil yang diceritakan di atas memfokuskan perhatiannya pada dunia pendidikan; hanya Yayasan Cahaya Guru yang memang berfokus pada pendidikan, khususnya guru. *Kelima*, ragam kegiatan ketiga organisasi masyarakat sipil yang digambarkan di atas berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman. Program Sekolah Damai dari Wahid Foundation memberikan wadah kepada para warga sekolah—siswa, guru, dan kepala sekolah—untuk memahami dan mengalami perbedaan. Program Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru membantu para guru untuk menjadi agen penyemai kebinekaan. Adapun berbagai program dan kegiatan dari Interfidei membuka wawasan para pesertanya mengenai dialog antar iman. Temuan-temuan tersebut diringkas dalam tabel 1 berikut.

Berbagai program yang dijalankan oleh organisasi-organisasi tersebut dinilai berperan terhadap pengelolaan keragaman di satuan pendidikan dalam dua hal. *Pertama*, program-program tersebut menyoal sekolah, guru, dan/atau siswa. Artinya, berbagai sekolah, guru, serta siswa yang berpartisipasi dalam salah satu

program tersebut mendapatkan pencerahan tentang berbagai strategi dalam menghadapi keragaman. Dalam uraian di atas, program Sekolah Damai Wahid Foundation menyasar sekolah-sekolah, para guru, serta para siswa; program Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru menyasar para guru; sementara program-program Interfidei ada yang menyasar para guru, ada pula yang menyasar para siswa.

Tabel 1. Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keragaman di Sekolah

Organisasi	Program	Sasaran
Wahid Foundation	Sekolah Damai	Siswa, guru, kepala sekolah
Yayasan Cahaya Guru	Sekolah Guru Kebinekaan	Guru
Interfidei	Beragam seminar, lokakarya, pelatihan	Guru, siswa

Sumber: Hasil olah data

Kedua, program-program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah serta para guru dalam mengembangkan strategi-strategi pengelolaan keragaman. Dalam ungkapan yang lebih gamblang, sekolah dan guru dapat meniru berbagai strategi yang sudah ada untuk kemudian diterapkan di sekolah dan kelas mereka masing-masing. Dengan bekal yang didapatkan dari berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keragaman, sekolah-sekolah dan para guru dapat berbuat lebih banyak; dari mulai menerapkan apa yang sudah diajarkan hingga mengembangkan program dan kegiatan baru.

Terlepas dari ada dan berjalannya peran mereka dalam pengelolaan keragaman di sekolah, organisasi masyarakat sipil yang digambarkan di atas memiliki kerentanan dalam isu yang mereka usung. Umumnya, dan telah disinggung sedikit di atas, pengelolaan keragaman dikaitkan dengan toleransi. Mengusung isu toleransi di Indonesia membawa kerentanan tertentu; yaitu bahwa isu toleransi merupakan isu yang riskan diperdebatkan, dan seringkali dikaitkan

dengan liberalisme.¹ Oleh karena itu, orang yang mengusung isu toleransi kemudian rentan dilabeli sebagai seorang liberal.² Liberalisme bagi sebagian masyarakat Indonesia dipahami sebagai hal yang negatif; dan demikian pula seorang liberal. Liberalisme dan pengusungnya dianggap negatif karena ide tentang kebebasan yang diusungnya dapat merusak nilai-nilai tertentu yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama nilai-nilai yang berbasis ajaran agama. Dengan adanya potensi antipati terhadap liberalisme dalam diri sebagian masyarakat Indonesia, isu toleransi yang diusung oleh organisasi masyarakat sipil menjadi kontraproduktif, atau setidaknya berkemungkinan menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut karena adanya kecurigaan bahwa isu toleransi yang diangkat merupakan agenda liberalisme.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Uraian-uraian di atas telah menunjukkan bahwa ketiga organisasi masyarakat sipil yang telah dibahas dalam tulisan ini didirikan oleh orang-orang yang memiliki visi tentang pengelolaan keragaman yang baik. Hal tersebut tercermin dalam visi-visi serta misi-misinya, dan kemudian mewujudkan dalam berbagai program dan kegiatan. Sekolah-sekolah, para guru, serta para siswa yang menjadi sasaran menjadi bukti bahwa berbagai program dan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman di sekolah. Kontribusi ragam program dan kegiatan tersebut yaitu dalam penumbuhan kesadaran akan pentingnya sikap toleran dalam menghadapi keragaman yang ada di lingkungan sekolah, yang selanjutnya dapat memunculkan sikap yang memandang penting penghormatan terhadap perbedaan serta perdamaian. Namun, organisasi masyarakat sipil yang mengusung isu toleransi di dunia pendidikan harus menyadari bahwa ada sebagian pihak yang menganggap bahwa isu tersebut merupakan agenda liberalisme dan berkemungkinan untuk ditolak atau ditentang.

1 Lihat misalnya salah satu pendapat mengenai isu toleransi dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta yang menentang pemahaman toleransi ala liberalism (STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, n.d.).

2 Lihat misalnya bagaimana Abdurrahman Wahid sering dicap liberal (Muhammad, 2020).

Sehubungan dengan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, tulisan ini mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta berbagai dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar: (1) melakukan pemetaan yang lebih mendalam dan meluas mengenai berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan keragaman di satuan pendidikan, dan (2) mengadopsi program organisasi masyarakat sipil yang dianggap tepat dan efektif dalam pengelolaan keragaman atau memfasilitasi organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan program-program mereka yang dinilai berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga mengusulkan kepada organisasi masyarakat sipil yang mengusung isu toleransi di dunia pendidikan untuk membuat wacana tandingan yang dapat menjawab keraguan sebagian masyarakat Indonesia tentang pentingnya toleransi dalam rangka pengelolaan keragaman di sekolah.

PUSTAKA ACUAN

- Ali-Fauzi, I. (n.d.). *Mengenang Djohan*. Retrieved June 13, 2022, from <https://www.paramadina-pusad.or.id/mengenang-djohan/>
- Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. (2022). *Sekolah Lintas Iman*. https://www.usd.ac.id/fakultas/teologi/sekolah_lintas_iman.php
- Farikhatin, A. (2016). Berhadapan dengan Prasangka: Merespons Isu Sesat Ahmadiyah terhadap Sekolah PIRI I Yogyakarta. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, & M. Tahun (Eds.), *Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru* (pp. 1–16). Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada.
- Farikhatin, A. (2019). Belajar Menghargai bersama Interfidei. In S. A. Prsetya (Ed.), *Belajar dari Perbedaan: 20 Tahun Institut DIAN/Interfidei (1991-2011)* (pp. 113–118). Interfidei.
- Hasibuan, M. H. F., & Yeltriana. (2021). Tinjauan Yuridis Peran Organisasi Masyarakat Sipil terhadap Upaya Kesejahteraan Anak Terkhusus di Sektor Pendidikan. *Kalam Keadilan: Jurnal Hukum*, 9(2), 109–114. <http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/kalam-keadilan/article/view/163/133>
- Hendrik, H., Ulumuddin, I., Atmadiredja, G., & Widjaja, I. (2020). *Belajar Hidup Berdampingan: Studi mengenai Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah*. Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/1629814571_Puslitjak_23_Belajar_Hidup_Berdampingan.pdf
- Herdiansyah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>
- Interfidei. (n.d.). *Interfidei*. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.interfidei.or.id/profil>
- Januarti, N. E. (2013). Integrasi Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 61–70. <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5342/4645>
- Kamim, A. B. M. (2019). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perintisan Sistem Informasi Desa di Kalibening Dukun Magelang Jawa Tengah. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 183–203. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/1346/752>
- Khairiah, & Walid, A. (2020). Pengelolaan Keberagaman Budaya melalui Multilingualisme di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 132–144. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/789/562>
- Kompas.com. (2021, January 26). *Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/edu/>

- read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all
- Latief, H. (2013). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 124–139. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/540/537>
- Media Indonesia. (2022, April 1). *Gaungkan Narasi Toleransi, Wahid Foundation Fasilitas 10 Kreator Konten Islam Moderat*. *MediaIndonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/482691/gaungkan-narasi-toleransi-wahid-foundation-fasilitas-10-kreator-konten-islam-moderat>
- Merdeka.com. (n.d.). *Eka Darmaputera*. Retrieved June 13, 2022, from <https://m.merdeka.com/eka-darmaputera/profil>
- Muhammad, Z. (2020, July 16). *Ratapan Gus Dur karena Keseringan Dituduh Liberal: Why Always Me?* NU Online. <https://jatim.nu.or.id/opini/ratapan-gus-dur-karena-keseringan-dituduh-liberal--why-always-me--8zzpG>
- Mukhlisin, M. (2020). *Sekolah Guru Kebinekaan (Materi presentasi dalam kegiatan Penyusunan Laporan Kajian Pengelolaan Keragaman Peserta Didik Pasca Zonasi Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)*.
- Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus. (2019, July 16). *Pembukaan KKN-IK di Institut DIAN/Interfidei Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus 2019*. <https://afi.iainkudus.ac.id/index.php?page=detil&id=55821>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003). https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf
- Rumahuru, Y. Z. (2018). Mengembangkan Pendidikan Agama Inklusif sebagai Solusi Pengelolaan Keragaman di Indonesia. *Jurnal Teruna Bhakti*, 1(1), 59–69. <http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna/article/view/13/22>
- Sefriyono. (2014). Harmoni dalam Perbedaan: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 1–16. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/download/389/265>
- Setiawan, A. (2021, April 11). *Refleksi Intelektualitas Daniel Dhakidae - Historia*. <https://historia.id/politik/articles/refleksi-intelektualitas-daniel-dhakidae-P740E/page/1>
- Sindonews. (2021, November 30). *Wahid Foundation Luncurkan Modul Panduan Soal Toleransi dan Perdamaian*. *Sindonews.Com*. <https://nasional.sindonews.com/read/614785/15/wahid-foundation-luncurkan-modul-panduan-soal-toleransi-dan-perdamaian-1638285116>
- SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. (2022, April 11). *“Power of Goodness” Belajar Bersama Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei)*. *Smabopkri2yk.Sch.Id*. <https://www.smabopkri2yk.sch.id/berita/110-power-of-goodness-belajar-bersama-institute-for-interfaith-dialogue-in-indonesia-interfidei>
- STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. (n.d.). *Iman dan Toleransi Beragama*. *Alhikmah.Ac.Id*. Retrieved August 8, 2022, from <https://alhikmah.ac.id/iman-dan-toleransi-beragama/>
- Sucahyo, N. (2019, November 20). *Negara Tidak Boleh Toleran terhadap Intoleransi*. <https://www.voaindonesia.com/a/negara-tidak-boleh-toleran-terhadap-intoleransi/5173915.html>
- Suhadi. (2016). Pengantar: Kreativitas guru dalam mengelola keragaman di sekolah. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, & M. Tahun (Eds.), *Mengelola keragaman di sekolah: Gagasan dan pengalaman guru* (pp. iii–viii). CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada.
- Suharko, & Kusumadewi, C. D. M. (2019). Organisasi Masyarakat Sipil dan Restorasi Sungai: Studi Pada Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 81–104. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/1677/1365>

- Suprobo, L. (2019, November 11). *Th. Sumartana, Memuliakan Persaudaraan antarumat Beragama*. <https://alif.id/read/lp/th-sumartana-memuliakan-persaudaraan-antarumat-beragama-b224346p/>
- Tempo.co. (2011, September 11). *Komisaris PT Tempo Inti Media Tbk. Zulkifly Lubis Wafat*. <https://nasional.tempo.co/read/355581/komisaris-pt-tempo-inti-media-tbk-zulkifly-lubis-wafat/full&view=ok>
- Tempo.co. (2014). *Begini Yayasan Cahaya Guru Menyoal Kerudung*. <https://nasional.tempo.co/read/541850/begini-yayasan-cahaya-guru-menyoal-kerudung/full&view=ok>
- Tirto.id. (2017). *Yayasan Cahaya Guru Ajak Pengembangan Wawasan Kebhinekaan*. <https://tirto.id/yayasan-cahaya-guru-ajak-pengembangan-wawasan-kebhinekaan-co4N>
- Tribun Makassar. (2018, December 15). *Interfidei Jogja, Lapar Sulsel dan OASE Intim Latih 15 Fasilitator Perdamaian*. <https://makassar.tribunnews.com/2018/12/15/interfidei-jogja-lapar-sulsel-dan-oase-intim-latih-15-fasilitator-perdamaian>
- UIN Sunan Kalijaga. (2018, February 19). *Sekolah Lintas Iman UIN Sunan Kalijaga Lahirkan Ahli Politik Bermartabat untuk Indonesia yang Beradab*. <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/176/sekolah-lintas-iman-uin-sunan-kalijaga-lahirkan-ahli-politik-bermartabat-untuk-indonesia-yang-beradab>
- Wahid Foundation. (2019). *Mencipta generasi penjaga kebhinekaan: Panduan Sekolah Damai, konsep dan indikator*. Wahid Foundation.
- Wahid Foundation. (2020). *Wahid Foundation*. Wahid Foundation. <https://wahidfoundation.org/index.php>
- Wahid Foundation. (2021, June 18). *Buku Sekolah Damai adalah Bukti Keberhasilan Sekolah Damai Wahid Foundation*. Wahidfoundation.Org. <https://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Buku-Sekolah-Damai-adalah-Bukti-Keberhasilan-Sekolah-Damai-Wahid-Foundation>
- Wahyuni, D. (2019). *Dialog Keagamaan Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia (Interfidei)*. *Al-Adyan: Jurnal Ilmu Perbandingan Agama*, 10(2), 150–159.
- Warsito, R. J. (2019). *Interfidei dan Generasi Masa Depan*. In S. A. Prsetyo (Ed.), *Belajar dari Perbedaan: 20 Tahun Institut DIAN/Interfidei (1991-2011)* (pp. 161–163). Interfidei.
- Widiarti, P. W., Hastari, C., Setiawan, B., & Machmiah, S. (2016). *Model Komunikasi Multiagama di Interfidei Yogyakarta*.
- Wildan, M. (2010). *DIAN/Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia*. *Thaqaifiyyat: Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 211–227.
- Yayasan Cahaya Guru. (2018). *Yayasan Cahaya Guru*. <https://cahayaguru.or.id/about-us#>

